

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Barang Milik Daerah Untuk Tertib Administrasi Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Nurchahaya Simamora^{1*}, Bambang Irawan²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ Simamoranurchahaya80@gmail.com, ² bbgirw80@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 18, 2025

Revised : April 2, 2025

Accepted : April 12, 2025

Keywords:

Regional Asset Supervision



Copyright (c) 2025
Abiwara : Jurnal Vokasi
Administrasi Bisnis

ABSTRACT

Starting from the background of this study, the supervision of the management of regional property carried out by the Equipment Section so far in the author's observation is still considered ineffective due to various problems found in the use of BMD in several OPDs, sub-districts and sub- districts. Some of these problems include records and findings from the Inspectorate on the use of computers in OPDs that are not in accordance with the standards according to applicable regulations, some official vehicles are not immediately returned after the expiration of their term of office, damage to BMDs without maintenance. This shows that the supervision carried out by the Equipment Section is still considered technically and administratively negligent. This study uses a qualitative descriptive research method with data collection through interviews and observations. The theory used in this study is the supervision theory from Pasaribu (2011) where supervision will run well if there are four key indicators, namely monitoring, examination, guidance, disciplinary action and corrective action. From the results of the research analysis conducted by the researcher, based on this theory, most of the supervision carried out by the Equipment Section is in accordance with the rules, it's just that due to several factors, the supervision does not run less than optimally. However, the Equipment Section continues to strive to overcome these obstacles through the direction and guidance of the leadership

PENDAHULUAN

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satunya adalah adanya otonomi daerah yang mana di dalamnya termasuk pengelolaan kekayaan yang dimiliki yang merupakan sebagai aset daerah.

Barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah, seringkali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti bahwa Kota Bekasi sejak Tahun 2022 - 2024 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Qualified Opinion atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum wajar, namun ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Beberapa pengecualian tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan sistem pengendalian internal, pengelolaan BMD, serta pengadaan barang dan jasa. Beberapa kesalahannya pada aset yang mana seharusnya belanja modal, namun dicatat di belanja persediaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bekasi mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset terutama dari sisi penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, pelaporan serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian BMD sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset. Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Setda Kota Bekasi khususnya oleh Bagian Perlengkapan selama ini dalam penyusunan laporannya menjadi salah satu bagian terpenting sebelum dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat terdapat beberapa catatan penting terkait beberapa BMD seperti perangkat komputer Tahun 2024 dan Kendaraan Dinas Operasional, yang mana komputer merupakan salah satu alat paling



penting untuk keberlangsungan kerja pegawai namun masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas. Selain masalah tersebut penggunaan kendaraan dinas operasional juga masih tidak sesuai tupoksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Perlengkapan masih dianggap lalai secara administratif.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengevaluasi pengawasan Barang Milik Daerah yang ada pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Untuk mengevaluasi kendala apa saja dalam pelaksanaan pengawasan Barang Milik Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; dan
3. Untuk mengungkapkan solusi dalam mengatasi hambatan- hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan Barang Milik Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

KAJIAN LITERATUR

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.

McCurdy dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara atau metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi Negara, dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Henri Fayol mengemukakan pandangan bahwa terdapat prinsip-prinsip administrasi yang harus diterapkan dalam organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu kepada kepentingan umum, remunerasi, sentralisasi, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas tenaga kerja, inisiatif, dan semangat korps. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat mengatur dan mengelola sumber daya secara efisien, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Basuki (2020:151) pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah di sini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengolahan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemngamanan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Tahyudin, 2015). Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya fisi dan misi suatu organisasi. Menurut Herawaty (2016), pengawasan adalah proses untuk menentukan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi yang diukur sesuai dengan ditetapkan kriteria, norma dan standar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2019) riset kualitatif adalah proses pencarian untuk memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok, serta kemampuan untuk mendefinisikan tantangan sosial dan kemanusiaan. Moleong (2017:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara uraian daupplam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang bersifat alamiah. dengan memanfaatkan berbagai cara alami.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian berdasarkan konsep postpositivisme yang digunakan untuk menilai keadaan hal-hal yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumennya (Sugiyono, 2016:9). Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang dipilih secara langsung dan merupakan pegawai yang berwenang dalam pengelolaan BMD sesuai judul penelitian.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang terletak dalam Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Bekasi. Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Secara umum metode pemeriksaan aset tetap dilakukan dengan 3 metode pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan perhitungan, namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas yang ada di Bagian Perlengkapan adalah hanya metode pemeriksaan fisik saja.

1) Metode pemeriksaan fisik

Metode ini dilakukan dengan cara mengecek secara langsung kondisi fisik aset. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aset tersebut masih dalam kondisi baik atau sudah rusak atau tidak layak digunakan lagi. Pemeriksaan fisik juga harus dilakukan secara rutin agar informasi kondisi aset selalu *up-to-date* sehingga pengelola aset dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti aset tersebut.

2) Metode pemeriksaan dokumen

Metode pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengecek dan meneliti dokumen yang berhubungan dengan aset. Dokumen yang diperiksa berupa dokumen pembelian, faktur, surat jalan, bukti pembayaran, sertifikat, kepemilikan dan lain-lain.

3) Pemeriksaan perhitungan

Metode pemeriksaan perhitungan dilakukan dengan cara mengecek dan meneliti perhitungan yang berhubungan dengan aset. Perhitungan yang diperiksa dapat memberikan informasi tentang jumlah aset yang dimiliki, jumlah depresiasi yang telah dibebankan, dan nilai buku aset.

Dalam upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhemat maka diperlukan adanya pembinaan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan teori Pasaribu (2011) bahwa pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pemberian pedoman merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan BMD. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat/pelaksana dalam hal pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan BMD. Dalam hal ini Bagian Perlengkapan sebagai pengelola BMD mengacu pada pedoman Peraturan Menteri tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Perwal dan SOP.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kualitatif melalui pengamatan peneliti dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang Milik Daerah di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang Milik Daerah di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dilihat dari aspek teori Pemantauan, Pemeriksaan, Bimbingan dan Pengarahan, Tindakan Disiplin

- dan Tindakan Koreksi. Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis bahwa dikatakan pengawasan berupa pemantauan dan monitoring dilaksanakan sudah berdasarkan pedoman seperti adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Keputusan Walikota Nomor 000.2.3.2/ Kep.106-BPKAD/I/2024 tentang Pejabat Yang Mengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, Surat Tugas dan SOP. Pada saat pemantauan dilakukan sesuai dengan teori dikatakan bahwa dilakukan pengecekan langsung terhadap hal maupun orangnya serta dimana dia bertugas. Pada saat pemantauan Tim Pengawas dari Bagian Perlengkapan melakukan pengecekan langsung terhadap unit BMD, juga mewawancarai pengguna barang perihal terjadinya jika ditemukan suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah.
2. Pada aspek bimbingan semua unsur pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan dan Pengawasan BMD sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan seperti bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM. Meskipun dirasa belum optimal akan tetapi pimpinan selalu berupaya untuk memberi arahan kepada bawahan untuk mealukan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
 3. Dari segi tindakan disiplin, selain adanya sanksi seperti teguran dari atasan terhadap bawahan yang salah menggunakan wewenangnya penilaian pelaporan aset dan keuangan daerah berdasarkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu bukti bahwa adanya sanksi dan reward. Jika memperoleh opini WTP maka akan berpengaruh dengan menaikkan tunjangan kinerja pegawai, hal ini tentu akan memotifasi pegawai khususnya Bagian Perlengkapan untuk melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya terutama dalam pelaksanaan pengawasan BMD sebagai salah satu aset daerah Kota Bekasi, dan sebaliknya jika suatu daeran mendapat penilaian opini WDP maka kota tersebut tidak berhak untuk melakukan kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Pada Tahun 2023 Kota Bekasi hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Provinsi Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa pelaporan keuangan dan aset daerah Kota Bekasi belum maksimal dan sebagai sanksinya Pemerintah Kota Bekasi tidak berhak menaikkan tunjangan kinerja pegawai.
 4. Dari segi tindakan koreksi, dari pengamatan dan wawancara penulis bahwa masih belum optimal, karena setelah dilakukan evaluasi namun tidak ada tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya sehingga pelaksanaan pengawasan BMD masih dilakukan dengan sistem yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan kadang masalah-masalah sebelumnya berlalu tanpa ada penyelesaian.
 5. Terdapatnya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan BMD pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di bidang pengelolaan BMD baik secara administratif maupun secara teknis;
 - b) Jarak lokasi antara kantor Setda dengan lokasi OPD, Kecamatan dan Kelurahan lumayan jauh sehingga menyulitkan tim pengawas untuk melakukan pemantauan secara rutin;
 - c) Terbatasnya anggaran untuk dialokasikan terhadap perawatan dan penggantian unit BMD yang rusak ataupun hilang; Kurangnya koordinasi dari masing-masing pengurus barang di OPD untuk melaporkan kerusakan, hilang atau pindahtangan BMD;
 - d) Sering terjadi rotasi jabatan yang mengakibatkan beberapa kendaraan dinas operasional tidak dikembalikan ke Bagian Perlengkapan sehingga menyulitkan pengawasan BMD kendaraan dinas operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono Yusuf (2011). Dasar-dasar Akuntansi. Jilid 1, edisi 7, Stie YKPN: Yogyakarta
- Acar, O. & Patton, B.R. (2012). "Argumentation and Formal Reasoning Skills in an Argumentation-Based Guided Inquiry Course". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 46, (12), 4756-4760.

- Basuki, Y. R. (2020). Panduan Mudah Google Classroom. Perum Bumi Mondoroko Raya Ba 103 Singosari Kab Malang: 3basuki Publisher.
- B.F. Pasaribu, Rownlad. (2012). Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan. Depok: Universitas Gundarma
- Donna Okthalia Setiabudhi (2019) dengan judul: “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance”.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasibuan. Malayu SP. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Hendriyadi. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.